

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pembuatan laporan pada Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Klepu sudah memberikan pelayanan yang cukup baik. Namun masih terdapat beberapa permasalahan baik pada sistem administrasi, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kembali., maka dapat disimpulkan:

1. Kurang maksimalnya penindakan pelanggaran bagi kendaraan bermotor.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi pada bidangnya, seperti tenaga penguji kendaraan bermotor, petugas pencatatan, penerimaan, penyimpanan, inventarisasi dan pengeluaran barang, petugas mekanikal serta petugas pengamanan.
3. Kurangnya Manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada UPPKB Klepu
4. Fasilitas yang masih kurang memadai Aplikasi Jembatan Timbang Online (JTO) yang digunakan pada perangkat komputer Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Klepu masih sering mengalami masalah.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di Pelayanan UPPKB Klepu diperoleh analisa serta dipadukan dengan teori selama mengikuti perkuliahan Program Studi Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif. Adapun dalam pelaksanaan penimbangan tersebut belum sempurna yakni dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya beberapa hal yang dalam penerapan yang belum sesuai dengan teori yang diberikan sehingga hal ini perlu adanya saran. Saran yang dapat kami berikan yaitu :

1. Memaksimalkan penindakan pelanggaran bagi kendaraan bermotor

yang melanggar tanpa memberikan keringanan dengan catatan tidak boleh beroperasi di jalan.

2. Melakukan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkompeten sesuai pada bidangnya dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk petugas jembatan timbang.
3. Melaksanakan Manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) karena di UPPKB Klepu belum adanya Manajemen K3.
4. Merehabilitasi fasilitas-fasilitas yang masih kurang memadai agar lebih memadai karena di UPPKB Klepu masih banyak fasilitas-fasilitas yang kurang memadai dan kurang lengkap.
5. Perbaiki terhadap aplikasi Jembatan Timbang Online (JTO) setiap saat agar mencegah terjadinya masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. P. (2012). Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta.
- Indonesia, P. P. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Indonesia, P. R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Jakarta.
- Surat keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta
- Silaen, S. (2014). Dosen Kopertis Wilayah I dpk Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. *STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG*, 13-24.